

**EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI BIDANG
PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

*EVALUATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) IN THE FIELD OF EDUCATION
IN SEMARANG CITY*

Karal Cornelius Goktua, Dyah Lituhayu, Tri Yuniningsih
karalcorneliuz@gmail.com, lituhayudyah@yahoo.co.id, triyuningsih26@gmail.com

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> **Email:** fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

One form of government in handling the poor is the Family Hope Program (PKH). The Family Hope Program is a program of providing conditional social assistance to poor families who are designated as beneficiary families as regulated in the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. PKH targets are poor and vulnerable families registered in the Integrated Database of the Poverty Handling Program. This study aims to evaluate the implementation of the Family Hope Program (PKH) in the field of education in Semarang City. In its implementation, the PKH program still has shortcomings such as Beneficiary Families not utilizing aid funds properly. This study focuses on the Semarang City Social Service as the implementer of the PKH program in Semarang City. In this study, researchers used a qualitative research approach. The data collection methods used include interviews, observations, and documentation. By using William N. Dunn's evaluation theory. The results showed that, the implementation of the Family Hope Program was effective because it was precisely targeted at the target of the program objectives using the strategies that had been designed, efficiency in the implementation of the program was optimal, adequacy was good in the implementation of the program, equitable implementation of the program was achieved.

Keywords: Family Hope Program (PKH), Law Number 13 of 2011, Program Evaluation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin dengan

pengeluaran per kapita per bulan di angka bawah garis kemiskinan sebesar 25,90 juta penduduk. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan masih belum berhasil. Menurut Huraerah (2006:2) kebijakan pemerintah dalam menanggulangi

permasalahan kemiskinan mengalami beberapa kekeliruan. Pertama, pemerintah masih beorientasi pada aspek ekonomi dibandingkan aspek multidimensional dimana penanggulangan kemiskinan yang masih berfokus pada ekonomi terbukti mengalami kegagalan. Kedua, pemerintah lebih bernuansa kemurahan hati dibandingkan mengarahkan masyarakat menjadi lebih produktif. Ketiga, lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai objek. Terakhir, pemerintah masih menempatkan dirinya sebagai penguasa dibanding memposisikan dirinya sebagai fasilitator. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menciptakan pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam kondisi rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan suatu upaya dengan membentuk kebijakan atau program yang dapat membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sandang, perumahan, pekerjaan,

dan pelayanan sosial. Beberapa program telah dilaksanakan oleh pemerintah pada kepemimpinan kabinet kerja, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penanganan fakir miskin adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Basis Data Terpadu (BDT) sebagai dasar umum menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk kedalam Desil I (Rumah Tangga Sangat Miskin). Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH terdiri dari penduduk miskin yang memenuhi persyaratan berdasar pada aspek kesehatan yang dikhususkan pada ibu hamil dan balita dari rentan 0-6 tahun, aspek pendidikan seperti anak-anak yang sedang menempuh sekolah wajib belajar 12 tahun, serta aspek kesejahteraan sosial seperti lansia dan

penyanggandifabelitas. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Berikut adalah data mengenai persentase penduduk miskin berdasarkan pada kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat dari bagan di bawah ini.



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Jawa Tengah Berdasarkan Kota Tahun 2021 – 2023

Sumber : BPS Jawa Tengah

Gambar 1.1 berdasarkan data dari BPS Jawa Tengah, bahwa dapat diketahui kabupaten/kota yang dengan jumlah presentase penduduk miskin tertinggi, pada tahun 2023 adalah Kota Semarang dengan jumlah penduduk miskin 642.456,00, lalu ada Kota Tegal dengan jumlah 623.617,00, Kota Magelang dengan jumlah 602.794,00, Kota Surakarta dengan jumlah, dan terakhir terdapat pada Kota Pekalongan dengan

jumlah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan tindakan penanganan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin di Kota Semarang. Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan angka kemiskinan yang masih cukup tinggi adalah Kota Semarang. Berikut adalah data terkait jumlah penduduk miskin di Kota Semarang pada tahun 2021 sampai 2023.

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Semarang 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk miskin (Ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
2021	84,45	4,56
2022	79,87	4,25
2023	80,53	4,23

Sumber : BPS Kota Semarang

Data dari BPS Kota Semarang 2021-2023, menjelaskan bahwa Kota Semarang tahun 2021 terdapat jumlah penduduk miskin sebanyak 84,45 ribu orang atau 4,56 persen dari total penduduk, menurun sekitar 79,87 ribu orang dari jumlah penduduk miskin tahun 2021 yang jumlahnya 84,45 ribu orang (4,56 persen). Lalu naik kembali pada tahun

2023 sebesar 80,53 ribu orang atau 4,23 persen dari total penduduk Kota Semarang.

Tingginya angka kemiskinan di Kota Semarang juga dikarenakan beberapa kecamatan pada Kota Semarang masih tinggi pada angka kemiskinan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia masih harus berfokus pada upaya penanggulangan kemiskinan untuk dapat melakukan percepatan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dapat diketahui bahwa berdasarkan pada jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Tembalang memiliki jumlah penduduk miskin dan hampir miskin banyak berada pada Kelurahan Tandang, Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Sendangguwo. Jumlah Kartu Keluarga hampir miskin di Kelurahan Tandang 7.196 KK, sedangkan Kelurahan Rowosari berjumlah 1.631 KK. Dan Kelurahan Sendangguwo 5.582 KK. Kelurahan Sendangguwo termasuk dalam kelurahan dengan klasifikasi tingkat kemiskinan tertinggi ke 3 di Kecamatan Tembalang, yang perlu diketahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin dengan

pengeluaran per kapita per bulan di angka bawah garis kemiskinan sebesar 25,90 juta penduduk. Tingginya angka kemiskinan menggambarkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan masih belum berhasil. Menurut Huraerah (2006:2) kebijakan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan mengalami beberapa kekeliruan. Pertama, pemerintah masih beorientasi pada aspek ekonomi dibandingkan aspek multidimensional dimana penanggulangan kemiskinan yang masih berfokus pada ekonomi terbukti mengalami kegagalan. Kedua, pemerintah lebih bernuansa kemurahan hati dibandingkan mengarahkan masyarakat menjadi lebih produktif. Ketiga, lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai objek. Terakhir, pemerintah masih menempatkan dirinya sebagai penguasa dibanding memposisikan dirinya sebagai fasilitator. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menciptakan pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk dalam kondisi rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin.

Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan, hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan suatu upaya dengan membentuk kebijakan atau program yang dapat membantu warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sandang, perumahan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Beberapa program telah dilaksanakan oleh pemerintah pada kepemimpinan kabinet kerja, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT).

Melansir dari (laporgub.jatengprov.go.id) “ada penyalahgunaan dana bantuan pemerintah PKH di Kebonharjo RT3 RW4 Semarang Utara Semarang seorang bernama Prasetyo mendapat bantuan pemerintah PKH selama 3 tahun ini dan digunakan membeli motor honda beat baru sementara seorang janda bernama ibu tuti dan anaknya faizal terlantar dan tak bisa membayar sekolah karena satu kk dengan prasetyo ada manipulasi data harusnya yg dapat seorang ibu dan anaknya tapi malah diberikan ke prasetyo seorang.” Oleh karena itu pelaksanaan PKH khususnya di di Kota Semarang diperlukan evaluasi apakah bantuan PKH yang berupa uang tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat sudah berhasil dalam mencapai

tujuannya atau justru menimbulkan ketergantungan bagi penerimanya. Sebab untuk melihat tingkat pencapaian keberhasilan suatu program dapat tercapai apabila sasaran dan tujuan program tersebut telah tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan dilakukannya kegiatan evaluasi. Berdasarkan penjabaran dari latar belakang maka perlu adanya evaluasi terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang. Penelitian ini, peneliti ingin menjawab tujuan jangka pendek dalam program PKH, yaitu untuk dapat membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Adapun kategori penerima PKH yang ingin dikaji oleh peneliti yaitu pada kriteria komponen pendidikan. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk melihat kembali apakah bantuan program keluarga harapan (PKH) dalam bidang pendidikan berhasil mencapai tujuannya dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang. Adapun pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini yaitu, “Mengapa Program Keluarga Harapan (PKH) mampu mencapai tujuannya?”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

1. Ketepatan sasaran penerima PKH. Penentuan sasaran yang tepat dalam

pelaksanaan suatu program menjadi faktor yang penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran penerima PKH di Kota Semarang masih banyak ditemukan penerima PKH yang tidak tepat sasaran.

2. Peserta PKH tidak memanfaatkan bantuan yang diterima dengan semestinya.
3. Pelaksanaan PKH belum mampu berjalan secara efektif, khususnya dalam bidang pendidikan. PKH dalam bidang pendidikan ini bertujuan agar para keluarga miskin memperoleh kemudahan dalam akses pendidikan, mewujudkan peningkatan pendidikan anak usia sekolah, dan sebagainya, akan tetapi jumlah lulusan murid di Kota Semarang jenjang yang lebih tinggi tergolong masih rendah.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan Kota Semarang ?
2. Apa faktor penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang pendidikan di Kota Semarang.

2. Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan di Kota Semarang.

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi Publik Menurut Inu Syafie Kencana (dalam Sari dan Aufarul, 2020: 5) menyatakan definisi dari administrasi publik adalah:“(1) Administrasi publik adalah sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah yang telah dirumuskan oleh lembaga representasi politik. (2) Administrasi publik diartikan sebagai suatu bentuk proses kerjasama baik dengan perorangan ataupun kelompok dalam pelaksanaan kebijakan publik. (3) Administrasi publik adalah suatu bentuk proses yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan publik dengan penggunaan teknik-teknik dimaksudkan untuk pemberian pengarahan kepada usah seseorang.”

2. Kebijakan Publik

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam (Sari dan Aufarul, 2020 : 6) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang diperbuat atau tidak diperbuat oleh pemerintah yang diputuskan

dalam bentuk baik berupa peraturan ataupun berupa statement yang berbentuk lisan atau tulisan yang disampaikan oleh para aktor publik untuk kemudian dilakukan tindakan lanjutan berupa program yang dikeluarkan ataupun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

3. Evaluasi Kebijakan

Menurut Sudiro (2018:63), William N. Dunn, evaluasi istilah Kebijakan sama dengan interpretasi, penilaian, dan pelaporan numerik. Dalam hal ini, mengevaluasi manfaat dan nilai hasil kebijakan; Jadi, evaluasi kebijakan perlu menawarkan data yang akurat dan dapat dipahami mengenai pemenuhan kebijakan. Untuk lebih ringkas, Dunn menyatakan bahwa evaluasi mendorong refleksi pada nilai-nilai yang memandu pemilihan tujuan. Nilai umumnya dapat dipertanyakan dengan membaca dengan cermat tentang kesiapan tujuan dan sasaran William N. Dunn (Dunn,2003:434)

4. Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi selain menurut Van Meter dan Van Horn (1975) bahwa implementasi sebagai tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Kota Semarang penerima PKH, pendamping PKH Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kota Semarang.

a) Efektivitas

Dalam pelaksanaannya, PKH memberikan bantuan finansial bersyarat kepada keluarga miskin yang memiliki anak usia sekolah. Selain itu, program ini juga memberikan pendampingan sosial untuk mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. PKH tidak hanya berperan dalam memberikan bantuan finansial, tetapi juga dalam memperluas akses masyarakat miskin terhadap layanan publik lainnya seperti BPJS Kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Pendataan yang dilakukan dalam

program ini memastikan bahwa penerima manfaat adalah keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga ketepatan sasaran dapat tercapai.

Berdasarkan temuan di lapangan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan, namun masih terdapat kendala dalam aspek sosialisasi kepada penerima manfaat. Kurangnya pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengenai hak dan kewajibannya, terutama terkait besaran bantuan yang diterima, menunjukkan adanya kelemahan dalam proses penyebaran informasi. Kasus seorang lansia yang tidak mengetahui jumlah bantuan yang seharusnya diterima menjadi bukti bahwa sosialisasi program belum optimal. Kondisi ini berisiko menyebabkan penyalahgunaan dana bantuan oleh pihak lain, seperti dalam contoh di mana cucu penerima manfaat mengambil dana lebih besar daripada yang diberikan kepada lansia tersebut. Kelemahan dalam sosialisasi ini juga memperlihatkan adanya celah dalam pengawasan program. Minimnya informasi yang diterima oleh KPM, terutama kelompok rentan seperti lansia, dapat menghambat efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi yang lebih inklusif dan penguatan sistem

pengawasan agar bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan secara tepat oleh penerima manfaat. Dapat menyimpulkan bahwa tujuan dan sasaran program tidak sepenuhnya tercapai, sebab masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya lansia dan masyarakat berpendidikan rendah pada besarnya dana bantuan PKH.

b) Efisiensi

Dinas Sosial dan Kementrian Sosial Semarang dalam melaksanakan program PKH telah berhasil menggunakan dana yang dialokasikan secara semaksimal mungkin sehingga bahwa dalam hal pendanaan selalu tercukupi. Dengan terpenuhinya pendanaan yang diperlukan dalam program PKH di kota Semarang menyebabkan dalam pelaksanaannya serta strategi yang ditetapkan dapat dijalankan secara efisien dan tidak terhambat.

Dalam pelaksanaan pendanaan PKH, pendanaan selalu tercukupi dikarenakan yakni pendanaan murni dari APBN yang dikelola oleh Kemenkue melalui Kemensos dan kemenko PMK dan pendanaan APBN selalu tersedia karena dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya. Proses pencairannya juga langsung melalui perbankan, jadi tidak ada kendala dalam pendanaan.

Dalam temuan peneliti dengan terpenuhinya pendanaan yang dibutuhkan

dalam pelaksanaan program PKH serta adanya SOP yang mewajibkan bahwa tidak adanya pemungutan biaya kepada masyarakat menjamin bahwa tidak adanya pemungutan biaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Dalam hal ini, KPM tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun karna tidak ada biaya apapun di dalam pengusulan Bantuan Sosial dari Kemensos jadi pelaksana tidak punya alasan untuk memungut biaya kepada masyarakat. Peneliti juga menemukan temuan dari masyarakat di lapangan ketika ingin membuat permintaan untuk pelayanan PKH, masyarakat tidak dipungut biaya sama sekali dan tidak adanya suatu pungutan liat dari oknum tertentu. Dapat dinyatakan bahwa di dalam efisiensi pendanaan yang digunakan dalam Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan efisien.

c) **Kecukupan**

Dari hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan dapat dianalisis bahwa di dalam hal sarana dan prasarana, Dinas Sosial telah menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Sarana yang digunakan dalam pendataan dan penyaluran bantuan selalu diperbarui untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan program ini. Selain itu,

pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyediakan fasilitas yang mendukung edukasi dan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Peneliti menemukan bahwa masyarakat penerima Program Keluarga Harapan tidak pernah mengalami kendala dalam sarana dan prasarana untuk pelaksanaan PKH. sistem yang digunakan dalam pendataan dan penyaluran bantuan sudah terintegrasi dengan baik, sehingga memastikan bantuan sampai langsung kepada penerima manfaat tanpa adanya hambatan. Dalam pelaksanaan PKH, sarana dan prasarana Dinas Sosial memiliki system yang terintegrasi dengan perbankan untuk memastikan bantuan langsung masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat tanpa perantara. Selain itu, ada fasilitas pendukung seperti pelatihan bagi penerima manfaat dan layanan penadamping sosial untuk memastikan program berjalan sessai dengan tujuan.

Prasarana yang disediakan oleh Dinas Sosial juga mendukung pelaksanaan PKH yakni mencakup ruang layanan konsultasi, ruang pertemuan untuk edukasi penerima manfaat, ruang pengaduan, serta fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas dan lansia. Dengan demikian bahwa didalam kecukupan sarana dan

prasarana sudah sangat memadai bagi Keluarga Penerima Manfaat. Dalam hal ini semua penerima akan mendapatkan dana manfaat dari Program Keluarga Harapan dengan baik.

d) Perataan

Dari hasil temuan penelitian yang telah dipaparkan dapat dianalisis bahwa Dinas Sosial telah berhasil dalam penyaluran dan pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan di setiap kecamatan yang ada di Kota Semarang. Sasaran program PKH dalam bidang pendidikan adalah anak-anak dari keluarga penerima manfaat (KPM) agar tetap bersekolah dan tidak mengalami putus sekolah, sesuai dengan komitmen program dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Anak-anak dari keluarga penerima manfaat PKH di Kota Semarang berhak mendapatkan bantuan pendidikan ini. Pelaksana memastikan bahwa mereka tetap bersekolah dan tidak mengalami kendala biaya selama orang tua mereka terdaftar sebagai penerima manfaat PKH. Dalam jangkauan pelaksana, PKH sudah menyentuh hampir seluruh kecamatan di Kota Semarang, terutama melalui kegiatan monitoring di sekolah-sekolah. Pelaksana bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak dari penerima

PKH tetap bersekolah dan orang tua memahami pentingnya pendidikan sebagai bagian dari syarat program ini.

Berdasarkan data capaian Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bidang pendidikan yang tercatat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kota Semarang tahun 2023, realisasi program ini telah menjangkau seluruh kecamatan di Kota Semarang. PKH bidang pendidikan telah berhasil merata di 16 kecamatan di Kota Semarang, meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, Semarang Timur, Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Semarang Selatan, Candisari, Gajah Mungkur, Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Semarang Barat, Mijen, Ngaliyan, dan Tugu.

e) Responsivitas

Dari hasil temuan dilapangan peneliti menemukan bahwa masyarakat yang menerima manfaat dari PKH merasa terbantu terutama dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Bantuan yang diberikan pemerintah membantu meringankan beban keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Program PKH ini sangat membantu masyarakat terutama untuk biaya sekolah anak-anak. Dulu masyarakat kesulitan membeli perlengkapan sekolah, tapi

sekarang bisa lebih ringan karena ada bantuan dari pemerintah.

Peneliti juga menemukan bahwa masyarakat mengapresiasi bantuan ini, masih terdapat tantangan dalam tingkat responsivitas mereka terhadap kewajiban yang menyertai program. Banyak penerima manfaat hanya berfokus pada penerimaan dana bantuan tanpa memahami atau menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan, seperti menghadiri pertemuan dengan pendamping sosial atau memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin. Masyarakat tidak memahami aturan atau kewajiban lain yang harus dipenuhi karena masyarakat hanya mengetahui yang penting bantuan tetap cair saja.

Peneliti juga menemukan banyak penerima manfaat enggan menghadiri pertemuan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran mereka terhadap pentingnya aspek non finansial dari program ini. Kurangnya kesadaran ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam program PKH. Pendamping sosial memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada penerima

manfaat agar mereka tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi juga menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan dalam program ini.

Dengan demikian peneliti menarik awal kesimpulan bahwa responsivitas masyarakat terhadap PKH sudah baik namun masih ada beberapa tahapan yang belum optimal seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban mereka.

f) Ketepatan

Dalam hasil penelitian dilapangan peneliti menemukan terdapat beberapa kendala yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan program ini. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa masih ada penerima manfaat yang tidak memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan utama program. Salah satu permasalahan yang muncul adalah rendahnya kehadiran anak-anak penerima manfaat di sekolah. Pendamping PKH membantu memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bersekolah. Namun dalam praktiknya, masih ada anak-anak yang jarang masuk sekolah meskipun orang tua mereka menerima bantuan pendidikan dari PKH.

Peneliti juga menemukan bahwa sering terjadinya penyalahgunaan dana bantuan PKH untuk keperluan di luar pendidikan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan temuan di lapangan dengan beberapa penerima manfaat, diketahui bahwa sebagian dari mereka menggunakan dana tersebut untuk membayar hutang atau kebutuhan lain yang tidak berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Masyarakat kadang memakai uang tersebut untuk bayar utang dulu soalnya kebutuhan sehari-hari mereka juga banyak jadi ya dipakai untuk keperluan tersebut.

Dalam hal tersebut pendamping sosial yang mengungkapkan bahwa masih ada masyarakat yang kurang memahami bahwa dana PKH harus digunakan sesuai dengan tujuan program. Ketidaktepatan dalam pemanfaatan dana PKH ini menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas program. Seharusnya, dana yang diberikan dapat membantu anak-anak untuk tetap bersekolah, membeli perlengkapan sekolah, dan mendukung kesejahteraan mereka. Namun, karena kurangnya pemahaman dan pengawasan, bantuan ini terkadang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pendamping sudah sering mengingatkan bahwa dana ini harus digunakan pendidikan dan kebutuhan anak, tapi masih ada KPM yang lebih memprioritaskan pembayaran hutang atau kebutuhan lainnya.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa belum semua penerima manfaat memahami bahwa dana PKH seharusnya digunakan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta edukasi yang lebih intensif agar bantuan yang diberikan dapat benar benar dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan program.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan di Kota Semarang

a) Standar dan sasaran kebijakan

Dalam hal ini hasil penelitian yakni bahwa Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya sudah menentukan beberapa kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH. Masyarakat wajib yang pertama yaitu harus masuk kedalam data kemiskinan desa, jadi kalau masyarakat sudah masuk pada data kemiskinan desa maka itu sudah dianggap miskin kemudian nanti pusat yang menentukna apakah masyarakat mendapatkan bantuan PKH atau tidak.

Dalam hal ini ada beberapa syarat untuk menentukan warga tersebut berhak menerima bantuan PKH atau tidak yang pertama warga yang namanya masuk pada

data kemiskinan desa yang menandakan bahwa masyarakat tersebut miskin walaupun untuk penentuan akhir kepesertaan PKH tetap pusat yang menentukan. Selain data dari pusat yang menentukan masyarakat yang mana berhak menerima bantuan PKH, pendamping PKH memiliki tugas untuk dapat membantu pemerintah pusat dalam menentukan sasaran penerima PKH. Jadi data dari pusat akan memfilter dengan berkoordinasi dengan pihak desa untuk memastikan apakah orang tersebut benar-benar mempunyai komponen dan layak menerima PKH atau tidak.

Peneliti menemukan bahwa selain dari pusat menentukan diterima atau tidaknya masyarakat. Dinas Sosial juga langsung turun lapangan untuk menentukan sasaran calon PKH. Pendamping akan berkoordinasi dengan desa untuk memilah masyarakat mana yang masuk ke kriteria komponen PKH dan layak mendapatkan bantuan PKH. Adapun kegiatan visit to door yang dilakukan pendamping untuk memverifikasi peserta PKH. Kegiatan tersebut dilakukan oleh pendamping PKH untuk melihat langsung kondisi perekonomian masyarakat penerima PKH kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa penerima PKH adalah mereka yang benar-benar kurang

mampu ekonominya dan memenuhi kriteria kepesertaan PKH, sehingga ketidaktepatan sasaran penerima PKH dapat diantisipasi. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan PKH adalah mereka yang memenuhi syarat dari kriteria komponen. Pendamping akan melakukan survey langsung ke lapangan dengan tujuan memfilter siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan PKH.

b) Sumberdaya

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa KPM sudah berjalan dengan baik karena mereka para penerima bantuan PKH ini sudah memenuhi kewajibannya yaitu menyekolahkan anaknya. Adanya edukasi ini akan penting bagi pendidikan yang disampaikan oleh para pendamping saat kegiatan pendampingan juga berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Adanya bantuan PKH ini membawa kemajuan bagi para KPM untuk menyekolahkan anaknya sampai jenjang SMA. Pendamping juga melakukan setiap satu bulan sekali mengadakan pertemuan kelompok, untuk yang komponen pendidikan kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita juga bahwa absensi apakah masing-masing KPM tersebut hadir atau tidak, dan setiap bulan kita para pendamping juga terjun ke

sekolahan masing-masing untuk menanyakan apakah anak penerima PKH tersebut rajin ke sekolah atau tidak. Jika ditemukan ternyata anak penerima PKH yang bersangkutan jarang masuk nanti kita juga ada laporan dan bantuan yang diberikan juga akan ditangguhkan. Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan bahwa sudah bagusnya KPM untuk memenuhi kewajiban menyekolahkan anaknya.

c) **Hubungan antar Organisasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan, pelaksana biasanya melakukan sosialisasi hanya lewat kumpulan begitu dengan informasi-informasi terbaru tentang PKH, untuk kumpulan pertemuannya dilakukan di rumah setiap peserta PKH-masing-masing secara bergantian. Penyampaian sosialisasi yang diberikan juga seputar PKH. Pendamping memberikan materi dan menyuruh parah KPM mendengarkan dan menulis apa yang disampaikan pendamping. Materi yang disampaikan juga terkait dengan pemanfaatan dana bantuan, kewajiban peserta, dan lain-lain. Pendamping PKH menjelaskan bahwa kesulitan ini sering kali terjadi karena adanya kesenjangan dalam pemahaman teknologi dan informasi di kalangan penerima manfaat, terutama di daerah yang lebih terpencil. Bagi banyak

lansia, misalnya, sistem yang berbasis digital atau online bisa menjadi hambatan besar, karena mereka mungkin tidak terbiasa dengan penggunaan ponsel atau internet. Selain itu, banyak dari mereka yang merasa kesulitan untuk memahami prosedur yang lebih kompleks terkait dengan pencairan dana atau perubahan kebijakan yang berlaku. Begitu pula dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah yang seringkali tidak memiliki cukup pemahaman terkait manfaat dan ketentuan dari bantuan yang diterima. Hal ini mengarah pada kebingungan mengenai bagaimana cara mengakses dan memanfaatkan bantuan PKH secara optimal. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan atau komunikasi yang terjalin antara pendamping PKH dengan penerima PKH dalam menjalankan program ini belum berjalan dengan secara maksimal.

d) **Karakteristik Agen Pelaksana**

Peneliti menemukan bahwa peran pendamping disini dalam program PKH yaitu pendamping setiap melakukan pertemuan kelompok dengan para KPM pendamping memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan sosial. Selain itu juga pendamping memiliki peran untuk memberi saran dan masukan setiap

KPM yang sudah mampu untuk bisa melakukan graduasi, membantu para KPM yang memiliki kendala dalam kepesertaannya. Guna menyukseskan program keluarga harapan, pendamping PKH selain berperan sebagai pendamping untuk memfasilitatori, memberikan edukasi kepada penerima PKH, pendamping PKH juga selalu memberikan informasi terupdate tentang PKH kepada penerima PKH, memberikan edukasi terkait pemanfaatan dana bantuan dan sebagai pemberi solusi ketika masyarakat penerima PKH mengalami kendala dalam kepesertaannya.

Hasil dari kesimpulan yang bisa ditarik bahwa kinerja dari pendamping PKH dalam pelaksanaan PKH di Kota Semarang berjalan dengan baik. Para pendamping yang memiliki peranan penting dalam keberjalanan program ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya.

e) Disposisi atau sikap para pelaksana

Hasil penelitian yang telah dipaparkan bahwa pendamping melakukan tugas pendampingan PKH sesuai dengan SOP yang berlaku di PKH, ketika ada validasi dari pusat terkait calon peserta PKH kita melakukan koordinasi dengan pihak desa yang dampingi masing-masing untuk di pastikan apakah data yang tertera tersebut

sebenarnya mampu atau tidak, layak masuk PKH atau tidak. Kemudian kamu para pendamping terjun ke lapangan untuk melihat secara riil kondisi peserta PKH. Jadi untuk jalanya program PKH di Kota Semarang apakah sudah berjalan dan tujuan dari PKH sudah tercapai menurut saya sudah karena ya sebenarnya bantuan PKH ini tepat guna dan manfaat dalam membantu masyarakat dari masalah kemiskinan. Dalam hal ini pendamping juga sudah bekerja dengan baik, kalau ada peserta PKH yang konsultasi gitu juga diberi saran dan masukan, terus jika ada KPM tidak dapat terus ingid dapat gitu dijelaskan oleh pendamping untuk syarat memiliki komponen.

Analisis yang dapat disimpulkan bahwa sikap dari pelaksana kebijakan program keluarga harapan sudah baik dan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya dan mengacu pada SOP yang berlaku, membantu masyarakat penerima PKH dalam hal pemberian masukan ataupun solusi guna mengatasi peroslan atau kendala yang dihadapi penerima PKH.

f) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Dalam penelitian yang telah dipaparkan yang pasti pendamping sebagai pelaksana PKH

tidak mengusulkan name by name untuk masyarakat yang belum mampu untuk datanya masuk dalam penerima PKH. Tahapannya sendiri masyarakat harus masuk kedalam data kemiskinan desa, nanti diserahkan oleh bupati nanti setelah diserahkan ke bupati data dikirim dipusat kemensos, dan yang menentukan adalah kemensos si A /B ini dapat bansos apa, apakah PKH atau yang lain jadi keputusannya tetap ada pada kemensos. Penentuan tahapan masyarakat dapat menjadi penerima PKH adalah warga tersebut datanya harus masuk dalam data kemiskinan desa, untuk kemudian diserahkan kepada bupati untuk diteruskan dipusat kemensos, sehingga yang berhak menentukan seseorang dapat menjadi peserta PKH adalah kemensos. Dalam hal ini para actor kebijakan saling menjalin kerjasama untuk menyukseskan pelaksanaan PKH di Kota Semarang. Partisipasi dari masyarakat penerima PKH juga berperan aktif untuk turut serta menyukseskan program keluarga harapan dalam mencapai tujuannya. Penerima PKH berpartisipasi untuk memenuhi kewajibannya sebagai peserta PKH, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh pendamping, dan lain sebagainya. Partisipasi aktif dari masyarakat penerima PKH Kota Semarang juga mendorong

terwujudnya keberhasilan program keluarga harapan.

Dalam hal ini yang dapat dianalisis bahwa kondisi lingkungan (dukungan) para aktor kebijakan dalam pelaksanaan PKH sangatlah berpengaruh. Baik pendamping PKH ataupun pihak pemerintah saling berkoordinasi untuk bisa memenuhi tujuan dari pelaksanaan PKH. Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan adalah seperti rapat koordinasi dan monitoring untuk mengetahui persoalan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan PKH di Kota Semarang.

KESIMPULAN

Program PKH di Dinas Sosial dan Kementrian Sosial Kota Semarang belum dikatakan sudah berhasil hal ini dibuktikan dengan adanya masalah pada 3 dari 6 indikator evaluasi dalam hasil penelitian. Salah satu indicator evaluasi yang masih bermasalah yaitu indicator efektivitas, dikarenakan masih ditemukanya kendala dalam sosialisasi kepada penerima manfaat lansia dan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Kurangnya pemahaman mengenai jumlah bantuan yang diterima menyebabkan beberapa penerima manfaat berisiko mengalami penyalahgunaan. Indikator kedua yaitu responsivitas, responsivitas masyarakat terhadap program

PKH masih rendah, hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang menerima manfaat hanya berfokus pada pencairan dana dan banyak masyarakat yang hanya memahami itu saja tanpa harus memahami atau menjalankan kewajiban seperti menghadiri pertemuan dengan pendamping sosial atau memastikan anak tetap bersekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Indikator ketiga yaitu ketepatan, program PKH di Kota Semarang belum mencapai ketepatan karena kesesuaian program. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kepatuhan penerima manfaat dalam menggunakan bantuan sesuai tujuan program. Beberapa penerima manfaat menggunakan dana bantuan untuk membayar utang atau keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan program. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua penerima manfaat memahami bahwa dana PKH seharusnya digunakan untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta edukasi yang lebih intensif agar bantuan yang diberikan dapat benar benar dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan program. Tiga indikator evaluasi yang dapat dikatakan berhasil yaitu pertama indikator efektivitas, Program PKH di Kota Semarang sudah dikatakan efektif dikarenakan sudah tepat tujuan program

yang dijalankan oleh Dinas Sosial. Salah satu tujuan PKH adalah untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional keluarga miskin dan juga memberikan layanan pendidikan yang layak. PKH juga memberikan perlindungan sosial yang merupakan cara mencegah adanya kemiskinan structural khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin yang rentan dan mengalami putus sekolah. Dengan adanya program ini memastikan bahwa setiap penerima manfaat benar benar mendapatkan haknya sesuai ketentuan. Indikator kedua efisiensi pada indikator hal ini dibuktikan dengan pendanaan dalam pengelolaan program yang terpenuhi dan maksimal. Indikator ketiga pemerataan, program keluarga harapan di Dinas Sosial dan Kementerian Sosial sudah merata hal ini dibuktikan dengan luas jangkauan program yang telah mencapai semua kecamatan di Kota Semarang.

Faktor-Faktor Pendorong dan penghambat Kinerja PKH Bidang Pendidikan di Kota Semarang Keberhasilan suatu program ataupun kebijakan tentu didalamnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor yang menunjang kinerja pelaksanaan program keluarga harapan bidang pendidikan di Kota Semarang diantaranya yaitu :

- 1) standar dan sasaran kebijakan. Faktor standar dan sasaran kebijakan sudah berjalan dengan baik, penerima PKH yang sudah tepat sasaran sesuai dengan data yang diberikan oleh pusat dan penerima PKH adalah mereka yang memiliki salah satu dari tiga komponen PKH, tujuan dari PKH di Kota Semarang juga sudah tercapai. Masyarakat terbantu dengan bantuan dana yang diberikan untuk meringankan mereka dalam memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.
- 2) Sumberdaya, berkaitan dengan peranan penting dari sumberdaya manusia yaitu penerima PKH sebagai sasaran kebijakan menjalankan kewajibannya untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang SMA dan pendamping PKH sebagai pelaksana kebijakan untuk menyukseskan program keluarga harapan dalam mencapai tujuannya dan meminimalisir ketidaktepatan sasaran program, pendamping PKH melakukan monitoring ke sekolah-sekolah untuk memastikan apakah penerima PKH yang bersangkutan benar-benar menyekolahkan anaknya sesuai dengan data yang ada.
- 3) Hubungan antar Organisasi, Pendamping PKH menjelaskan bahwa

kesulitan ini sering kali terjadi karena adanya kesenjangan dalam pemahaman teknologi dan informasi di kalangan penerima manfaat, terutama di daerah yang lebih terpencil. Bagi banyak lansia, misalnya, sistem yang berbasis digital atau online bisa menjadi hambatan besar, karena mereka mungkin tidak terbiasa dengan penggunaan ponsel atau internet. Selain itu, banyak dari mereka yang merasa kesulitan untuk memahami prosedur yang lebih kompleks terkait

- 4) Karakteristik agen pelaksana, berkaitan dengan kinerja dari pendamping PKH dalam pelaksanaan PKH di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Para pendamping yang memiliki peranan penting dalam keberjalanan program ini sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya.
- 5) Disposisi, pelaksana kebijakan program keluarga harapan sudah baik dan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya dan mengacu pada SOP yang berlaku.
- 6) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, berkaitan dengan partisipasi aktif baik dari masyarakat sebagai kelompok sasaran dan pelaksana kebijakan. Koordinasi selalu dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk mendukung

pelaksanaan PKH dalam mencapai tujuannya. Selain itu, untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PKH di Kota Semarang, strategi yang diterapkan oleh pelaksana kebijakan yaitu *on the track* sesuai dengan kondisi di lapangan.

SARAN

1. Pertama, peningkatan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perlu diperkuat, terutama dalam hal hak, kewajiban, dan mekanisme pencairan dana. Pendamping PKH harus lebih aktif dalam memberikan edukasi langsung kepada KPM, terutama kelompok rentan seperti lansia, agar mereka memahami jumlah bantuan yang diterima dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan.
2. Kedua, pengawasan terhadap kepatuhan KPM dalam memenuhi kewajiban pendidikan harus diperketat. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan sekolah dan pendamping PKH untuk memastikan bahwa anak-anak penerima manfaat tetap bersekolah secara teratur. Mekanisme pemantauan, seperti absensi sekolah yang terintegrasi dengan sistem PKH, dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Ketiga, perlu ada kebijakan tegas dalam pengelolaan dana PKH agar digunakan

sesuai dengan tujuan program. Pendamping sosial dapat memberikan bimbingan terkait pengelolaan keuangan kepada KPM, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan dana. Jika ditemukan penyalahgunaan dana yang berulang, dapat diterapkan sesuai dengan regulasi PKH.

4. Keempat, adanya koordinasi antara pihak pemerintah desa, dinas sosial, dan pihak penyalur (bank) dalam penyaluran bantuan PKH sehingga dapat dipastikan penerima PKH adalah mereka yang memenuhi kriteria penerima PKH dan berhak mendapatkan serta yang tidak memenuhi kriteria penerima PKH juga tidak dapat menerima bantuan tersebut, sehingga ketidaktepatan sasaran dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Diponegoro, U. (n.d.). *EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KELURAHAN ROWOSARI KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG* Skripsi Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Oleh Herman Susanto, S. (n.d.).

EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN.

- Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). *EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR EVALUATION OF KELUARGA HARAPAN PROGRAM (PKH) IN SOUTH BOGOR DISTRICT OF BOGOR CITY.*
- Garini, N. A., Ramadhan, S. H., Aliyyah, I. N., Ramadhan, S., Rafinda, I., Sukmawati, E., & Sosial, P. K. (n.d.). *EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN LOGIC MODEL DI DESA KADUDAMPIT, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT* (Vol. 6).
- Pendidikan Dan Kesehatan Kecamatan, P. di, Gita Sari, A., Marom, A., Soedarto, J. H., & Tembalang Semarang Kotak, S. (n.d.). *EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA MENGATASI.*
- Taufiq, M., Dosen, R., Administrasi, I., Fakultas, N., Sosial, I., Humaniora, D., Dwi, M., & Mahasiswa, P. (n.d.). *EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018.*
- Aji, D. R. K., & Mahyani, A. (2022). *PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 2(3), 1090–1107. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.83>*
- Edu, E., & Rohman, A. (2019). *EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BATU. 8, 67. www.publikasi.unitri.ac.id*
- Di, M., Suliki, K., Kecamatan, D., Kabupaten, G., Puluh, L., Susridawati, K., & Ali, H. (2023). *Jurnal Mirai Management Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menurunkan Angka Stunting pada Keluarga Penerima. Jurnal Mirai Management, 8(2), 237–248.*
- Samian, S., Muchsin, S., & Afiffuddin, A. (2024). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban. Brilliant: Jurnal Riset Dan Konseptual, 9(2), 340–351. <https://doi.org/10.28926/briliant.v9i2.1921>*
- Pendidikan Dan Kesehatan Kecamatan, P. di, Gita Sari, A., Marom, A., Soedarto, J. H., & Tembalang Semarang Kotak, S. (n.d.). *EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA MENGATASI.*
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Asyamsuli, M. R., & Handrian, E. (2024). *Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun (Studi Kartu*

Identitas Anak Di Kecamatan Tebing).
1(1), 424–441.

Bella Devauli, Herbasuki Nur Cahyanto, A. M. (2024). Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Anak di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol 13, No, 1–18.

Choerunnisa, R. R., & Rosinta, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*,
<https://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3762> 8(6), 429.

Pasaribu, R. R. S. (2018). Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu. *JIsip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 7(2), 158–162.

Pasaribu, Ria Ratna Sari, Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu *JIsip: jurnal ilmu sosial dan politik*